

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), didirikan di Bangkok pada Agustus 1967 oleh lima negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang merupakan pionir dalam integrasi ekonomi di Asia Timur (Ishikawa, 2021). ASEAN merupakan sebuah badan geopolitik dan ekonomi yang terdiri dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Pembentukan organisasi ini dilatarbelakangi oleh keinginan yang teguh dari pendiri-pendiri ASEAN untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, aman, dan stabil secara bersama-sama. ASEAN terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan terakhir adalah Timor Leste yang baru bergabung pada 2023 (Kementerian Luar Negeri, 2023). Pada 2023, Indonesia sebagai ketuaan ASEAN. Selanjutnya pada 2024, ketuaan ASEAN dilanjutkan oleh negara Laos (Kementerian Perdagangan RI, 2024).

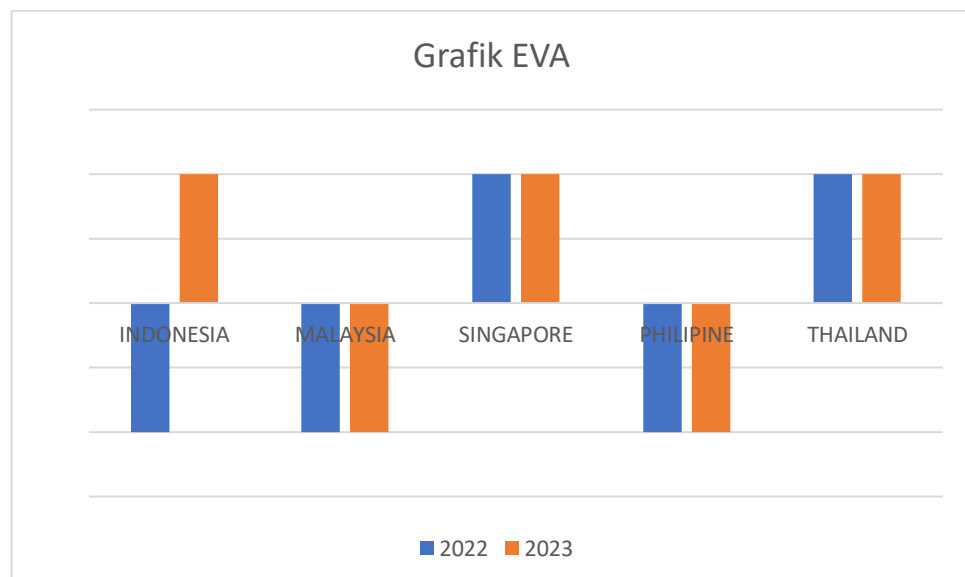
Pertumbuhan ekonomi di ASEAN terus menjadi sorotan yang cerah dan jarang terjadi dalam ekonomi global. Ekonomi ASEAN akan berakselerasi tahun 2024 ditengah penurunan kinerja ekonomi global. Proyeksi pertumbuhan sekonomi ASEAN akan berada di 4,6 persen pada 2024. ASEAN telah berhasil menjaga stabilitas suku bunga dan nilai tukarnya di kawasan, meskipun suku bunga global sedang meningkat.

Pondasi ekonomi ini menunjukkan ketahanan ASEAN terhadap guncangan-guncangan global dan konsistensi dalam perkembangan ekonomi kawasan sebagai pusat pertumbuhan (Kementerian Keuangan, 2023).

Peningkatan ekonomi ASEAN yang didukung ketahanan ekonomi Asia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Ketahanan keuangan sendiri adalah kemampuan suatu entitas, baik itu perusahaan maupun negara, untuk menanggulangi dan pulih dari tekanan serta risiko keuangan. Di tengah kondisi global yang tidak stabil, seperti krisis keuangan dan politik, ancaman resesi global dapat berdampak pada kinerja ekonomi suatu negara atau perusahaan (Saputra et al., 2023). Ketahanan finansial merujuk pada kemampuan suatu perusahaan untuk mengantisipasi, merencanakan, merespons, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan secara bertahap dan guncangan tiba-tiba yang tidak terduga, sehingga dapat bertahan dan tumbuh dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai untuk mengurangi defisit anggaran. Alasan utama bagi organisasi untuk menjaga ketahanan finansial adalah untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian lingkungan dan keterbatasan keuangan terhadap kesuksesan dan kelangsungan bisnis (Sreenivasan & Suresh, 2023).

Penggambaran konsep ketahanan keuangan mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pengontrolan dana, manajemen pengeluaran, perlindungan finansial, penanganan kekurangan atau tekanan finansial,

perencanaan keuangan, dan kewaspadaan terhadap penipuan. Pemahaman konsep ketahanan finansial ini secara khusus berhubungan dengan kapasitas perusahaan dalam mengevaluasi dan memanfaatkan sumber daya internal saat menghadapi tantangan keuangan (Hamid et al., 2023). Ketahanan keuangan menjadi esensial bagi perusahaan dan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan finansial tanpa menanggung kerugian yang berlebihan atau terjebak dalam kesulitan keuangan yang signifikan. Fungsi ini memiliki peran vital dalam upaya membangun ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Ketahanan ekonomi dan keuangan tersebut juga ditegaskan dalam komitmen kuat ASEAN untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs).



Gambar 1.1. Grafik EVA Indonesia, Malaysia, Singapore, Philipine, Thailand
Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan grafik tersebut, pada tahun 2022 dan 2023 EVA di Indonesia mengalami peningkatan dari hasil negatif ke hasil positif. Sedangkan Malaysia dan Filipina konsisten dengan hasil negatif. Singapura dan Thailand konsisten dengan hasil positif. Economic Value Added (EVA) negatif mencerminkan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang cukup untuk menutupi biaya modalnya (Alan Firmansyah et al., 2023). Transisi ke model bisnis yang lebih berkelanjutan mungkin memerlukan perubahan strategi yang signifikan. Dalam jangka pendek, perubahan ini mungkin tidak langsung menguntungkan secara finansial, yang dapat berkontribusi pada EVA negatif. Pengungkapan keberlanjutan yang baik bisa menjadi indikator perusahaan sedang mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja jangka panjangnya, meskipun dalam jangka pendek, mungkin berdampak negatif pada EVA karena biaya yang terkait dengan investasi dalam keberlanjutan dan penyesuaian strategi bisnis (Husnaint & Basuki, 2020a).

Dalam konteks mengukur ketahanan keuangan, Economic Value Added (EVA) dapat digunakan sebagai alat menilai ketahanan keuangan (Christina et al., n.d.). EVA mempertimbangkan biaya modal, yang mencakup biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana yang digunakan oleh perusahaan, termasuk bunga pinjaman dan biaya ekuitas (Tripathi et al., 2023). Dengan menggunakan EVA untuk mengukur ketahanan keuangan, perusahaan dapat melihat apakah mereka menciptakan nilai ekonomi yang cukup untuk menutupi biaya modal yang

mereka keluarkan. Jika nilai ekonomi yang dihasilkan (EVA positif) lebih besar dari biaya modalnya, itu menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan yang memadai untuk mengimbangi biaya modalnya, yang dapat dianggap sebagai indikator ketahanan keuangan yang baik (Sari et al., n.d.).

Dalam perkembangan mencapai target SDGs pada 2023, Thailand berada diranking 1 dalam Kawasan negara ASEAN dengan ranking global 43. Diurutan kedua dalam ASEAN adalah negara Vietnam dengan ranking global 55. Negara selanjutnya adalah Singapura dengan ranking global 64. Urutan keempat dalam negara ASEAN adalah Indonesia dengan ranking global 75. Urutan kelima dalam negara ASEAN adalah Malaysia dengan ranking global 78. Filipina dengan ranking global 98. Dalam urutan ke 7 ada negara Brunei Darussalam dengan ranking global 102. Negara Kamboja dengan ranking global 103. Setelah itu ada negara Laos dengan ranking global 115. Urutan kesepuluh adalah negara Myanmar dengan ranking global 125. Negara terakhir dalam ASEAN adalah Timor Leste yang belum mendapatkan ranking SDGS global. (Sustainable Development Report, 2023).

Tujuan yang sesuai pada jalur dan bisa mempertahankan SDG paling banyak dicapai negara – negara ASEAN adalah tujuan nomor 6 air bersih dan sanitasi layak. Untuk tujuan yang cukup membaik adalah tujuan nomor 9 industri, inovasi, dan infrastruktur. Untuk tujuan yang tersendat adalah nomor 2 menghapus kelaparan dan nomor 13 penanganan

perubahan iklim. Untuk tujuan yang mengalami penurunan adalah tujuan nomor 15 pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Sedangkan informasi yang tidak tersedia paling banyak ada ditujuan nomor 10 mengurangi kesenjangan (Sustainable Development Report, 2023).

Salah satu bentuk upaya ASEAN untuk mencapai SDGs yaitu, komitmen ASEAN untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan penerapan SDGs secara local (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Kawasan ASEAN kini menjadi pemimpin global dalam bisnis berkelanjutan, dimana perusahaan – perusahaan di Kawasan ini semakin besar kemungkinannya untuk mengungkapkan dampaknya kepada publik. Analisis terbaru yang dilakukan KPMG mengungkapkan Singapura (100%) dan Malaysia (99%) merupakan negara dengan tingkat pelaporan keberlanjutan tertinggi untuk perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan terkemuka di Filipina (87%) dengan cepat mengejar ketinggalan. Di ketiga negara tersebut, mayoritas dari 100 perusahaan teratas menggunakan Standar GRI untuk pelaporan (Global Reporting : 2023). . Di Indonesia sendiri 88% perusahaan tercatat menyampaikan sustainability report di 2022 (PwC : 2023).

Tidak hanya ASEAN, seluruh negara dihadapkan dengan tugas yang menantang untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari tahun 2016 hingga 2030. Persetujuan mengenai SDGs tersebut diresmikan dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar

Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana perwakilan dari 193 negara turut hadir (Arifianti, P& Widyaningsih, 2022.). Pada tanggal 2 Agustus 2015, kesepakatan terkait Sustainable Development Goals (SDGs) disahkan dalam pertemuan yang dihadiri oleh 193 negara dengan judul "Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan".

SDGs adalah perkembangan dari Millennium Development Goals (MDGs), walaupun keduanya memiliki perbedaan signifikan. MDGs cenderung terpaku pada pendekatan birokratis dan eksklusif karena tidak melibatkan entitas non-pemerintah, sedangkan SDGs jauh lebih inklusif dan holistik dalam cakupannya, mempertimbangkan peran pihak non-pemerintah dan berlaku secara universal (Eppinga et al., 2022). SDGs disusun melalui suatu proses partisipatif yang sangat melibatkan banyak pihak, dengan melakukan konsultasi bersama berbagai pihak yang memiliki kepentingan, termasuk pemerintah di berbagai negara dan organisasi diseluruh dunia dapat memainkan peran penting untuk membantu tercapainya SDGs dengan mengintegrasikan SDGs kedalam strategi mereka (Perello-Marín et al., 2022).

SDGs juga menekankan pentingnya kesetaraan baik antar-negara maupun di dalam masyarakat. Prinsip "no one left behind" mencerminkan sifat inklusif dari SDGs, yang menjamin bahwa tidak ada individu atau kelompok yang terpinggirkan atau dikesampingkan (Kumajas et al., 2022a). Dalam hal tujuan, jika sebelumnya MDGs bertujuan untuk mengurangi

setidaknya separuh dari masalah yang ada, SDGs mengusung target yang lebih ambisius dengan menghilangkan sepenuhnya masalah tersebut, yang dikenal dengan istilah "Zero Goals".

SDGs menegaskan signifikansi sektor swasta dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, peran bisnis dalam proses ini memiliki kepentingan yang besar dan dapat menjadi kunci kesuksesan atau penyebab kegagalan dalam menghadapi tantangan. Pendekatan pelaporan terintegrasi telah diidentifikasi sebagai cara yang menjanjikan untuk menyampaikan kemajuan perusahaan dalam mencapai SDGs dan dapat menjadi alat untuk menyatukan SDGs dalam pemikiran dan laporan organisasi (Izzo et al., 2020).

Standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan SDGs, salah satunya adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan sebuah organisasi standar internasional yang independen, yang membantu perusahaan, pemerintah, dan entitas lainnya untuk memahami serta menyampaikan dampaknya terhadap hak asasi manusia, korupsi, perubahan iklim, dan isu-isu lainnya. Melalui kerangka kerjanya, GRI membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara transparan dan dapat dibandingkan (Luo & Tang, 2023). Standardisasi ini memfasilitasi pemangku kepentingan luar untuk melakukan perbandingan dalam menganalisis seberapa baik kinerja perusahaan dalam hal isu-isu keberlanjutan yang menjadi perhatian utama masyarakat.

GRI juga digunakan untuk mengukur sustainability report yang dipublikasikan oleh perusahaan. Penggunaan praktik sustainability report telah mengalami peningkatan yang substansial dalam dua puluh tahun terakhir. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan terintegrasi di situs web mereka (Chairina & Tjahjadi, 2023). Sustainability report merupakan dokumen yang disiapkan oleh perusahaan atau organisasi dengan tujuan menyampaikan informasi mengenai praktik bisnis yang berkelanjutan serta dampaknya terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Fokus utama dari laporan keberlanjutan adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, karyawan, dan masyarakat umum mengenai kontribusi yang dilakukan perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjalankan tanggung jawab sosial mereka.

Selain menyampaikan topik yang berkaitan dengan laporan keberlanjutan, keberlanjutan kualitas laporan juga memiliki signifikansi penting. Perusahaan memanfaatkan pelaporan keberlanjutan dan penjaminan eksternal sebagai strategi untuk meningkatkan legitimasi mereka. Ketika perusahaan menunjukkan penjaminan eksternal terhadap laporan keberlanjutan mereka, tujuannya adalah memberikan informasi yang jelas kepada investor untuk menghindari kesalahan penilaian dan penafsiran yang salah terkait kinerja perusahaan. Dengan demikian, sinyal

yang diberikan oleh manajemen tercermin dalam penilaian investor terhadap perusahaan. Ini juga memiliki dampak yang signifikan pada citra positif perusahaan serta dapat meningkatkan prestise, yang pada gilirannya dapat memperkuat penjualan dan menarik minat dari klien, kreditor, dan pihak berwenang (Harymawan et al., 2020).

Namun dalam mencapai itu semua tidaklah mudah. Pada era disrupsi yang dikenal juga dengan volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity (VUCA) (Yuhertiana, 2023a), maka mitigasi berbagai bentuk resiko menjadi penting (Cheng & Foo, 2016a). Disini, *Enterprise Risk Management* (ERM) perlu diperhatikan oleh perusahaan. ERM mencakup identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan pemantauan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk menghadapi ketidakpastian dengan lebih efektif, dengan fokus pada pengelolaan risiko secara holistik dan terintegrasi di semua tingkat dan fungsi organisasi. ERM berusaha untuk meningkatkan pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan risiko potensial dan dampaknya terhadap tujuan organisasi (Renault et al., 2016).

Implementasi Enterprise Risk Management telah terbukti membantu perusahaan dalam meningkatkan kesadaran terhadap risiko di semua bagian dalam organisasi. Sudah menjadi kepercayaan yang umum bahwa menerapkan Manajemen Risiko Perusahaan akan membantu organisasi dalam mengurangi dampak negatif terhadap pasar keuangan, serta

mengurangi biaya secara langsung maupun tidak langsung dari kesulitan keuangan dan fluktuasi pendapatan (Maharani & Yonnedi, 2023). Dengan kata lain, pendekatan Manajemen Risiko Perusahaan yang terintegrasi tidak hanya meningkatkan proses pengambilan keputusan, tetapi juga kinerja dan nilai bisnis. Enterprise Risk Management (ERM) meningkatkan kinerja operasional perusahaan dengan meningkatkan efisiensi biaya, efisiensi pendapatan, dan pengembalian aset yang lebih tinggi (Fitriana & Wardhani, 2020).

Menurut Rahma Adissa & Septiani, (2022), ERM berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (EVA) dan sustainability report dapat memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan manufaktur di BEI. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh pelaporan keberlanjutan dalam memoderasi hubungan antara Enterprise Risk Management (ERM) pada kinerja perusahaan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2020. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan berjumlah 67 sampel. Studi tersebut memiliki beberapa batasan. Pertama, jumlah perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keberlanjutan terbatas, sehingga sampel yang tersedia menjadi terbatas. Kedua, karena keterbatasan data, beberapa data memiliki nilai ekstrem yang signifikan, sehingga dilakukan eliminasi data outlier untuk memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya, hasil uji

F menunjukkan nilai yang relatif rendah, menunjukkan bahwa variabel yang diteliti belum memberikan pengaruh yang signifikan.

Menurut Fitriana & Wardhani, (2020), ERM dan sustainability report berpengaruh positif terhadap ROA pada perusahaan non-keuangan negara ASEAN. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun ERM fokus pada pengelolaan risiko internal, perusahaan juga harus memperhatikan risiko-risiko eksternal, seperti risiko sosial dan lingkungan. Ada beberapa kekurangan dalam penelitian tersebut. Pertama, penelitian ini hanya memilih sampel perusahaan yang terdaftar dalam database GRI, sehingga tidak mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dari lima negara tersebut. Kedua, kinerja dievaluasi menggunakan ROA dalam periode yang sama, sehingga hanya memperhatikan kinerja jangka pendek. Sedangkan dalam penelitian ini ERM sebagai variabel moderasi dan EVA sebagai alat pengukuran ketahanan keuangan adalah variabel dependen, sustainability report sebagai variabel independent.

Menurut Fadilla dan Yuliandhari (2018) Sustainability Report tidak berpengaruh terhadap ROA. Penelitian menggunakan 7 perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun sehingga didapat 21 unit sampel perusahaan periode 2014-2016. Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan ASEAN sebagai objek penelitian dengan periode 2022 – 2023. Variabel dependen dalam penelitian ini juga tidak menggunakan ROA melainkan EVA.

Menurut Shad et al., (2019), sustainability report sebagai variabel moderasi antara ERM dan kinerja keuangan dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja keuangan (EVA). Studi tersebut menyusun kerangka kerja untuk menguji bagaimana pelaporan keberlanjutan dapat memoderasi hubungan antara penerapan Enterprise Risk Management (ERM) dan kinerja bisnis. Studi tersebut memanfaatkan analisis isi kuantitatif dari laporan tahunan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik manajemen risiko perusahaan dan pelaporan keberlanjutan. Data sekunder yang berkaitan dengan pengukuran nilai tambah ekonomi (EVA) juga digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah ERM sebagai variabel moderasi dan sustainability report sebagai variabel independent.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara ERM, sustainability report, dan kinerja keuangan, meskipun dengan temuan yang berbeda-beda. Penelitian ini memperluas cakupan dengan fokus pada perusahaan ASEAN dan menggunakan ketahanan keuangan dengan pengukuran EVA sebagai variabel dependen, serta sustainability report sebagai variabel independen dengan ERM sebagai variabel moderasi. Lebih dari itu, sustainability report dan ERM lebih banyak dilakukan penelitian pengaruhnya terhadap ROA. Sedangkan penelitian ini menggunakan EVA. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam konteks ketahanan keuangan perusahaan di kawasan ASEAN. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam konteks ketahanan keuangan.

Dari penjelasan di atas, pada era yang ditandai dengan perhatian yang semakin besar terhadap isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Susilowati et al., 2022; Yuhertiana et al., 2022), keberlanjutan menjadi fokus utama perusahaan di seluruh dunia (Husnaint & Basuki, 2020b) , termasuk di negara-negara ASEAN (Husnaint & Basuki, 2020b; Susilowati et al., 2023). Namun, meskipun telah banyak penelitian yang menyoroti hubungan antara pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) dan ketahanan keuangan perusahaan (Amru Karim Alhabsyi & Hwihanus Hwihanus, 2023), terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang bagaimana manajemen risiko memoderasi hubungan ini di konteks ASEAN. Ini menciptakan sebuah research dan fenomena gap dalam literatur yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan di kawasan ASEAN, risiko yang terkait dengan keberlanjutan menjadi semakin penting.

Oleh karena itu, urgensi untuk meneliti peran manajemen risiko sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara sustainability report dan ketahanan keuangan perusahaan di negara-negara ASEAN sangatlah signifikan. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana manajemen risiko dapat mempengaruhi hubungan antara pelaporan keberlanjutan dan ketahanan keuangan, dengan

demikian menawarkan kontribusi baru terhadap literatur tentang sustainability report dan praktik manajemen di kawasan ASEAN. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana perusahaan di ASEAN dapat mengelola risiko-risiko keberlanjutan untuk meningkatkan ketahanan keuangan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Keberlanjutan Bisnis Perusahaan Makanan dan Minuman di Pasar Modal Negara ASEAN: Peran Manajemen Risiko untuk Meningkatkan Ketahanan Keuangan”. Industri makanan dan minuman dipilih berdasarkan pemetaan peringkat negara ASEAN pada laporan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Sustainable Development Report, 2023). Dalam laporan tersebut, *Progress* capaian SDG nomor 2 yaitu mengurangi kelaparan tidak mengalami kemajuan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti kontribusi industri *food and beverage* yang seharusnya turut berperan untuk ikut mengurangi kelaparan di negara ASEAN.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh sustainability report terhadap ketahanan keuangan pada perusahaan makanan dan minuman di pasar modal negara ASEAN?

2. Bagaimana peran Enterprise Risk Management memoderasi pengaruh sustainability report terhadap ketahanan keuangan pada perusahaan makanan dan minuman di pasar modal negara ASEAN?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh sustainability report terhadap ketahanan keuangan pada perusahaan makanan dan minuman di pasar modal negara ASEAN
2. Menganalisis peran Enterprise Risk Management dalam memoderasi pengaruh sustainability report terhadap ketahanan keuangan pada perusahaan makanan dan minuman di pasar modal negara ASEAN

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:

Memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manajemen risiko dapat memengaruhi keterkaitan antara pelaporan keberlanjutan dan ketahanan keuangan, yang pada gilirannya memberikan sumbangan baru pada literatur mengenai laporan keberlanjutan dan praktik manajemen di wilayah ASEAN.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi perusahaan: Perusahaan di ASEAN akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pelaporan keberlanjutan terhadap ketahanan keuangan mereka. Dengan memahami bahwa manajemen risiko perusahaan berfungsi sebagai faktor yang memoderasi hubungan antara pelaporan keberlanjutan dan ketahanan keuangan, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengelola risiko dan meningkatkan ketahanan keuangan mereka.
- b. Pemerintah dan regulator: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pemerintah dan regulator di negara-negara ASEAN dalam merancang kebijakan yang mempromosikan praktik pelaporan keberlanjutan dan manajemen risiko yang lebih baik di perusahaan-perusahaan. Hal ini berpotensi membantu membangun lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan di wilayah tersebut.
- c. Investor dan pemangku kepentingan: Para investor dan pemangku kepentingan lainnya akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pelaporan keberlanjutan dan manajemen risiko perusahaan terhadap ketahanan keuangan. Pengetahuan ini dapat memperbaiki kualitas pengambilan keputusan investasi mereka serta memungkinkan

mereka memilih perusahaan yang menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan dan berfokus pada pengelolaan risiko.

- d. Masyarakat dan lingkungan: Dengan tingkat kesadaran yang semakin meningkat mengenai isu keberlanjutan dan risiko lingkungan, penelitian ini juga memiliki potensi memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah ASEAN. Dengan memperkuat hubungan antara pelaporan keberlanjutan, manajemen risiko, dan ketahanan keuangan, perusahaan-perusahaan di ASEAN dapat lebih mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis mereka. Hal ini dapat berdampak positif pada pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.